

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Benturan di masyarakat seringkali terjadi dalam proses interaksi sosial sehingga munculah sengketa antar para pihak yang sering disebut dengan sengketa perdata. Ada kalanya dalam suatu sengketa perdata kedua belah pihak baik tergugat maupun penggugat sama-sama mempunyai hubungan hukum sehingga diantara para pihak dapat saling menggugat untuk dipenuhinya suatu perhubungan hukum tersebut, misalnya dalam hal Penggugat juga melakukan wanprestasi terhadap Tergugat, sehingga Tergugat dapat mengajukan gugatan terhadap Penggugat sepanjang tidak menyimpang dari ketentuan yang ada. Gugatan dari pihak Tergugat ini disebut gugat balik atau Rekonvensi. Gugat rekonvensi merupakan gugatan yang diajukan oleh Tergugat terhadap Penggugat dalam sengketa yang sedang berjalan diantara mereka. Rekonvensi bersifat insidentil sehingga tidak setiap gugatan Penggugat dapat dibalas dengan rekonvensi oleh Tergugat. Tergugat baru dapat melakukan rekonvensi apabila secara kebetulan Penggugat juga pernah melakukan wanprestasi.

HIR tidak menentukan keharusan tentang adanya hubungan antara gugatan konvensi dan rekonvensi. Tetapi di dalam praktek apabila keduanya tidak ada hubungan hukum dirasakan amat janggal sehingga dalam hal ini hakim dapat memisahkan antara kedua gugatan tersebut dan akan diperiksa

sendiri-sendiri sebagai gugatan biasa. Menurut ketentuan Pasal 132 b ayat 1 HIR, rekonvensi yang diajukan Tergugat sebenarnya merupakan jawaban Tergugat terhadap gugatan Penggugat atas perkara yang sedang diperiksa, oleh karena itu rekonvensi diajukan bersama-sama dengan jawaban Tergugat baik tertulis atau lisan. Tuntutan rekonvensi pada hakekatnya merupakan komulasi atau gabungan dua tuntutan yang saling berhubungan. Hubungan ini dapat terjadi apabila antara pokok perkara gugatan konvensi dan pokok perkara gugatan rekonvensi menjadi kewenangan absolut Pengadilan Negeri disamping itu penggugat masih mempunyai hubungan hukum dengan tergugat dalam rekonvensi.

Pengajuan gugat balasan merupakan suatu hak istimewa yang diberikan oleh hukum acara perdata kepada tergugat untuk mengajukan suatu kehendak untuk menggugat dari pihak tergugat terhadap pihak penggugat secara bersama-sama dengan gugat asal. Suatu hak istimewa, oleh karena sesungguhnya pihak tergugat yang hendak menggugat pihak penggugat asal, disebut pula penggugat dalam rekonvensi, dapat pula menempuh jalan lain, yaitu dengan mengajukan gugat baru tersendiri, lepas dari gugat asal.<sup>1</sup>

Menurut ketentuan Pasal 132 a Ayat (1) HIR yang menyatakan tergugat dapat mengajukan gugat balas dalam segala perkara, yaitu:

1. Semula dalam perkara itu bukan bertindak untuk dirinya, sedang gugat balas ditunjukkan kepada dirinya sendiri dan sebaliknya.

---

<sup>1</sup> Retnowulan Sutantio, 1997, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung, Mandar Maju, Hal. 42

2. Jika pengadilan negeri kepada siapa gugat balasan itu dimasukkan tidak berwenang berhubungan dengan pokok perselisihan memeriksa gugat balasan (wewenang mutlak).
3. Dalam hal perselisihan tentang pelaksanaan putusan hakim. Misalnya hakim memerintahkan tergugat yang kalah supaya menyerahkan sebidang tanah kepada penggugat. Kemudian tergugat mengajukan reconvensi supaya penggugat membayar hutangnya yang dijamin dengan sawah tersebut. Hakim akan menolak reconvensi tersebut.<sup>2</sup>

Jika dalam pemeriksaan tingkat pertama tidak diajukan gugat balas, maka dalam tingkat banding tidak dapat diajukan lagi, hal ini seperti diatur dalam Pasal 132 a Ayat (2) HIR. Sedangkan dalam ketentuan Pasal 132 b Ayat (1) menyatakan bahwa tergugat harus mengajukan gugat balas bersama-sama dengan jawabannya, baik dengan tertulis maupun lisan.

Gugat reconvensi yang diajukan bersama dengan jawaban tergugat dan tidak diajukan secara tersendiri dalam proses persidangan yang lain mempunyai beberapa keuntungan antara lain apabila gugat balasan atau reconvensi ini diajukan bersama-sama dengan jawaban tergugat akan dapat menghemat ongkos perkara karena pemeriksaan dilakukan bersamaan dengan perkara pokok sehingga tidak lagi membayar ongkos perkara. Keuntungan selanjutnya adalah mempermudah prosedur karena secara tidak langsung memotong rangkaian proses mulai dari pengajuan gugatan sampai dengan pemanggilan para pihak untuk melakukan persidangan lagi. Reconvensi yang

---

<sup>2</sup> Moh Taufik Makarao, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Rineka Cipta, hal .67

diajukan bersamaan dengan jawaban tergugat juga dapat menghindarkan putusan-putusan yang saling bertentangan, karena gugatan konvensi dan rekonvensi diselesaikan sekaligus dan diputus dalam satu surat putusan, kecuali kalau pengadilan berpendapat bahwa perkara yang satu dapat diselesaikan lebih dahulu daripada yang lain. Dalam hal terjadi perkara yang satu dapat diselesaikan lebih dahulu daripada yang lain maka pemeriksaan perkaranya yang dapat didahulukan akan diperiksa terlebih dahulu aman tetapi gugatan semula dan rekonvensi yang belum diputuskan tetap diperiksa oleh hakim yang sama sampai dijatuhkan putusan terakhir.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam HIR, rekonvensi yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat sebagai tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hak Tergugat yang juga dilanggar oleh Penggugat. Pengajuan gugat rekonvensi harus berdasarkan peraturan yang berlaku dan memperhatikan larangan-larangan dalam mengajukan tuntutan rekonvensi, agar gugatan rekonvensi dapat diterima oleh Pengadilan Negeri. Oleh sebab itu Tergugat hendaknya mengajukan gugat rekonvensi dengan mematuhi ketentuan yang berlaku agar tidak menimbulkan masalah-masalah yang baru dan menghabiskan waktu dan biaya. Atas dasar uraian tersebut penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pelaksanaan gugatan rekonvensi dalam praktek di Pengadilan Negeri Surakarta melalui penulisa skripsi yang berjudul “GUGATAN REKONVENSI DALAM PERKARA UTANG PIUTANG ANTARA PT.BANK MAYAPADA DENGAN NASABAH (Studi kasus di Pengadilan Negeri Surakarta)”.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah, dapat diuraikan suatu permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan hukum ini. Permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan pemeriksaan reconvensi dalam perkara hutang piutang di Pengadilan Negeri Surakarta ?
2. Apakah permasalahan yang timbul dalam pemeriksaan reconvensi dan bagaimanakah cara mengatasinya ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penulisan hukum ini mempunyai beberapa tujuan yaitu sebagai berikut:

### **1. Tujuan Obyektif**

Tujuan obyektif dari penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui pelaksanaan pemeriksaan reconvensi dalam perkara hutang piutang di Pengadilan Negeri Surakarta.
- b. Mengetahui permasalahan yang timbul dalam pemeriksaan reconvensi dan cara mengatasinya.

### **2. Tujuan Subyektif**

- a. Memberi sumbangan pemikiran dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah ada untuk menunjang mata kuliah Hukum Perdata.

- b. Menyusun Skripsi sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum di Universitas Muhammadiyah Surakarta.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pemikiran di bidang ilmu hukum khususnya hukum perdata yakni tentang gugatan rekonsvansi dalam perkara perdata utang piutang dalam persidangan di Pengadilan Negeri.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara realistis solusi yang dapat dilakukan apabila terjadi permasalahan dalam gugatan rekonsvansi dalam perkara perdata utang piutang dalam persidangan di Pengadilan Negeri.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Untuk mengembangkan pola pikir dan mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan manfaat bagi semua pihak terutama sumbangan pemikiran dan pertimbangan dalam gugatan rekonsvansi perkara utang piutang oleh pihak ketiga pada persidangan di Pengadilan Negeri.

## E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan pedoman cara pandang seorang ilmuwan dalam mempelajari, menganalisa, dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya.<sup>3</sup>

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, bahwasanya penulisan skripsi ini mengenai gugatan rekonvensi dalam perkara perdata utang piutang yang didasar atas suatu kajian aspek hukum, dari aspek sosiologis dalam penelitian ini adalah mengkaji gejala-gejala sosial dalam masyarakat yaitu untuk mengetahui pelaksanaan gugatan rekonvensi perkara utang piutang dalam masyarakat.

### 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang ditujukan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala. Dan sesuai dengan jenis penelitian deskriptif maka dalam penelitian ini peneliti ingin memperoleh data yang seteliti mungkin tentang gugatan rekonvensi dalam perkara perdata utang piutang pada persidangan di Pengadilan Negeri.

### 3. Sumber Data

- a. Penelitian Kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder yang dapat diperoleh dengan menggunakan bahan:

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia Press. Hal.6 .

### 1. Bahan Hukum Primer

Data primer menurut Handari Nawawi adalah sebagai berikut :

Data primer adalah data autentik atau bahan data-data yang diperoleh langsung dari tangan pertama tentang masalah yang diungkap, disebut juga data asli.<sup>4</sup>

- a) KUHPerdata (BW)
- b) HIR dan RBG
- c) Yurisprudensi

### 2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan yang diperoleh dari buku-buku bacaan, laporan-laporan, hasil penelitian hukum yang ada hubungannya dengan gugatan rekonvensi dalam perkara perdata utang piutang di Pengadilan Negeri Surakarta.

### 3. Bahan Hukum Tersier

- a) Kamus Hukum
- b) Kamus Bahasa Indonesia

### b. Penelitian lapangan

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama melalui penelitian.

#### 1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yaitu di wilayah kompetensi Pengadilan Negeri Surakarta.

---

<sup>4</sup> Handari Nawawi, 1993. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press, hal : 80.



## 2. Subyek Penelitian

- a) Ketua Pengadilan Negeri
- b) Hakim Ketua

## 4. Metode Pengumpulan Data

### a. Penelitian Kepustakaan

Yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mencari, mengumpulkan dan mempelajari ketiga bahan tersebut diatas untuk dipergunakan dalam penelitian untuk mendapatkan data sekunder.

### b. Penelitian Lapangan

Yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung terhadap obyek yang diteliti guna mendapatkan data primer dengan cara:

#### 1. Interview

Yaitu dengan cara memberikan pernyataan kepada responden dan dari pernyataan-pernyataan itu kemudian penulis kembangkan berupa pernyataan yang timbul dari pemberi keterangan. Dengan cara ini penulis maksudnya untuk memperoleh data atau keterangan yang subyektif mungkin dari jawaban yang diperoleh.

#### 2. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengamati dan mempelajari individu/kelompok yang dapat memberikan keterangan tentang obyek penelitian<sup>5</sup>, yaitu mengamati jalannya persidangan di Pengadilan Negeri Surakarta.

---

<sup>5</sup> I Gusti Ngurah Agung, 1992, *Metode Penelitian Sosial (Suatu Pendekatan Praktik)*, Cetakan Kedua, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal.12

### 3. Pengambilan Sampel

Sample adalah unit terkecil dari populasi, sedangkan populasi adalah seluruh objek atau seluruh individu gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang diteliti. Pengambilan sampel dilakukan secara purposive sampling yaitu dalam pengambilan sampel tentang responden yang akan diteliti ditentukan berdasarkan kriteria atau patokan tertentu. Responden dengan kriteria tertentu yang dipilih dalam penelitian ini adalah Ketua Pengadilan Negeri, Hakim Ketua, dan pimpinan pihak bank.

### 5. Metode Analisa Data

Yaitu data yang diperoleh dalam penelitian ini menggunakan peraturan perundang-undangan dan serta bahan atau buku bacaan yang berkaitan dengan gugatan rekonvensi dalam perkara perdata utang piutang, yang kemudian dipadukan dengan pendapat responden, kemudian dianalisa secara kualitatif dan dicari pemecahannya, lalu ditarik kesimpulan yang dipergunakan untuk menjawab permasalahan yang ada.

## **F. Sistematika Skripsi**

### **BAB I. PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pembatasan Masalah
- C. Perumusan Masalah
- D. Tujuan Penelitian

- E. Manfaat Penelitian
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika Penelitian.

## **BAB II. LANDASAN TEORI/TINJAUAN UMUM**

- A. Pemeriksaan Sengketa Perdata
  - 1. Pengajuan Gugatan
  - 2. Penetapan hari Sidang dan Pemanggilan Para Pihak
  - 3. Pemeriksaan Perkara di Persidangan
  - 4. Perdamaian dalam Sidang Pengadilan
  - 5. Jawaban Tergugat
- B. Tinjauan Tentang Rekonvensi

## **BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Pelaksanaan Pemeriksaan Rekonvensi Dalam Perkara Hutang Piutang di Pengadilan Negeri Surakarta
- B. Permasalahan yang Timbul Dalam Pemeriksaan Rekonvensi dan Cara Mengatasinya

## **BAB IV. PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran-saran

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**